

Pesantren dan Politik Lokal: Jejak Koalisi Moral Dalam Kontestasi Elektoral di Wajo

Islamic Boarding Schools and Local Politics: Traces of Moral Coalitions in the Electoral Contest in Wajo

Besse Sri Ratih ¹, Muhammad Al Hamid ², Andi Naharuddin ³

¹ Bachelor Program of Political Science, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

^{2,3} Departement of Political Science, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Author correspondence: bessestratih@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: <i>Political Relations, Political Parties, Islamic Boarding Schools, Political Communication</i> Kata Kunci: Relasi Politik, Partai Politik, Pesantren, Komunikasi Politik How to Cite: Sri Ratih, B., Al Hamid , M., & Andi Naharuddin. Islamic Boarding Schools and Local Politics:: Traces of Moral Coalitions in the Electoral Contest in Wajo. <i>Journal of Peace, Security and Democracy</i>, 1(2), 74–94. DOI: 10.63280/jpsd.v1i2.44346	As'adiyah Islamic Boarding School and PAN cadres have a close relationship because many alumni of the boarding school are cadres. Many PAN cadres hold important positions in the Wajo Parliament and even the position of Chairman of the PAN DPP is an alumni of Asadiyah Islamic Boarding School, so indirectly it will be easier to establish communication with alumni and students of Asadiyah who are members of PAN. PAN uses a political strategy by introducing students to actors according to religious teachings and conditions in Wajo. Through religious activities, PAN maintains relations with the boarding school, sometimes with financial and infrastructure support. In addition, the success of alumni students, and the position of actors with PAN containers labeled as religion is very profitable and is an extraordinary strategy that is not intentional. Through religious programs such as religious studies, preaching, and Friday sermons and other activities, it seems to be a strong communication and branding pattern and in line with PAN's position which is engaged in the religious field with the keywords "branding Actor is a preacher, and branding communication entitled silaturahmi". The condition of Wajo as a city of

	Santri, PAN's position with a religious orientation, and the elected regent with a Muhammadiyah background who is supported by PAN's campaign team cadres who are alumni of the Asadiyah Islamic Boarding School, this is the right strategy in terms of winning the hearts of voters and shifting the incumbent's seat. Abstrak Pondok Pesantren As'adiyah dan kader Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki hubungan erat karena banyak alumni pesantren yang menjadi kader partai. Banyak kader PAN menjabat posisi penting di Parlemen Wajo dan bahkan jabatan Ketua DPP PAN merupakan alumni Pondok Pesantren Asadiyah, sehingga secara tidak langsung akan lebih mudah menjalin komunikasi dengan alumni dan santri Asadiyah yang tergabung dalam PAN. PAN menggunakan strategi politik dengan memperkenalkan santri kepada aktor sesuai ajaran agama dan keadaan di Wajo. Melalui kegiatan keagamaan, PAN menjaga hubungan dengan pesantren, kadang dengan dukungan finansial dan infrastruktur. Selain itu, keberhasilan alumni santri, dan posisi aktor dengan wadah PAN yang berlabel agama sangat menguntungkan dan merupakan extraordinary strategy yang tidak disengaja. Melalui program keagamaan seperti kajian agama, dakwah, dan khutbah jumat serta kegiatan lain seolah merupakan pola komunikasi dan branding-an yang kuat dan sejalan dengan posisi PAN yang bergerak di bidang keagamaan dengan kata kunci "branding Aktor merupakan pendakwah, dan branding komunikasi yang bertajuk silaturahmi". Keadaan Wajo sebagai kota Santri, Posisi PAN dengan orientasi keagamaan, serta bupati terpilih berlatar belakang Muhammadiyah yang didukung kader timses PAN yang merupakan Alumni Santri Ponpes Asadiyah, hal ini menjadi strategi yang tepat dalam hal untuk mengambil hati pemilih dan menggeser kursi incumbent. Copyright © 2025 JPSPD. All rights reserved.
--	--

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara dengan penduduknya yang multikultural dan plural, yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras dan antar golongan. Berdasar atas pluralitas keislaman di Indonesia, maka dapat menjadikan setiap kelompok keagamaan dalam Islam dapat dimanfaatkan sebagai basis pendukung setiap kepentingan politik (Haikal, 2024). Kyai dan tokoh pesantren sering kali menjadi lahan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) maka suara kyai dan santri selalu diperebutkan bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis (Fernando et al., 2023; Ardiansyah, 2014)). Secara historis, fungsi dasar pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan tradisional yang berbasis Islam. Namun demikian, pesantren juga memiliki kedudukan yang penting dalam ranah politik, baik dalam lingkup masyarakat tradisional maupun nasional. Posisi pesantren selalu berada dalam pusaran arus tarik-menarik kepentingan politik (Nurjaman et al., 2021). Hampir pada setiap kontestasi politik, pesantren dan para figur di dalamnya selalu menjadi target empuk untuk dijadikan vote getter. Bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam, tetapi juga oleh partai-partai politik nasionalis. Apalagi, sejak kontestasi Pemilu Presiden 2014 lalu, wacana politik identitas dengan simbolisasi dan atribusi bernuansa keagamaan semakin menguat.

Muncul dan berkembangnya pendidikan Islam termasuk pesantren di Sulawesi Selatan tak terlepas dari wacana keagamaan di Haramain dan Nusantara pada abad 20 (Syamsuddin, 2007). Sejarah membuktikan bahwa Pendidikan pesantren di Sulawesi Selatan secara tidak langsung dimulai sejak Islam diterima di Makassar pada 1605 (Arif, 2007)). Belum ditemukan data yang memadai mengenai ulama Bugis-Makassar yang mewakili guru intelektual abad 19, kecuali bahwa resesi sosial-politik di Kerajaan Wajo pertengahan abad 19 memaksa migrasi besar-besaran orang Wajo ke beberapa wilayah di Nusantara dan Mekkah yang kemudian dihubungkan dengan dibukanya Terusan Suez tahun 1861 (Arif, 2007). Pandangan ini cukup dapat menjelaskan keberadaan orang Bugis-Wajo di Mekkah abad ke 19 yang kemudian melahirkan sosok “arsitek pesantren” abad ke 20 di

Sulawesi Selatan, meminjam istilah Abdurrahman Mas'ud, yakni al- Allamah Syekh Muhammad As'ad yang lebih populer disebut "Gurutta As'ad atau Gurutta Sade (Alimin, 2013; As'adiyah Pusat, 2023).

Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sengkang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 379.396 jiwa pada tahun 2021 (BPS Wajo, 2025). Di Kabupaten Wajo ada sekitar 17 pesantren yang tersebar di seluruh 14 kecamatan se-Kabupaten Wajo. Hal ini membuat Kabupaten Wajo selain dikenal sebagai kota sutera juga dijuluki sebagai kota santri. Kabupaten Wajo memiliki 706 Masjid dan 106 Musala (BPS Kab. Wajo, 2025). Dari 17 Pesantren di Kabupaten Wajo, salah satunya merupakan pondok pesantren tertua di Sulawesi Selatan, yaitu Pondok Pesantren Asadiyah yang berdiri pada tahun 1930. Dari pesantren itulah lahir beberapa tokoh Islam seperti imam Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar, pendiri Pesantren DDI Mangkoso, KH Abdurrahman Ambo Dalle, pendiri Ponpes Yayasan perguruan Islam Beowe (Yasrib) Soppeng, KH Daud Ismail, pendiri Ponpes Nurul Azhar Talawe Sidrap, KH Fathuddin Sukkara dan masih banyak lagi (As'ad, 2018; Harbani, 2024). Hal ini bisa saja membuktikan bahwa pesantren di Kabupaten Wajo memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan sampai ke pengaruh politik.

Relasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik di tingkat daerah umumnya bertujuan untuk mendapat dukungan dalam pemilihan kepala daerah. Relasi ini biasanya disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. Seperti halnya di Kabupaten Wajo yang dikenal sebagai kota santri, hal ini menjadi tugas dari partai politik untuk bagaimana bisa mendekatkan diri dengan kelompok pesantren. Beberapa contoh yang bisa mengindikasikan aktivitas tertentu ialah peristiwa Bantuan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Wajo yang terus mengalir. Hal ini tidak terlepas dari komunikasi dan sinergi yang terjalin baik antara pemerintah daerah dengan tokoh maupun wakil rakyat di pemerintah pusat. Satu di antara bantuan itu datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Bantuan dalam bentuk anggaran yang diperuntukkan

untuk pembangunan rumah susun (rusun) di Kampus III Pondok Pesantren (Ponpes) Asadiyah Sengkang (Kementrian PU, 2025).

Bupati Wajo, Amran Mahmud, menjelaskan, Ponpes As'adiyah telah eksis sejak lama dan banyak melahirkan berbagai tokoh nasional maupun internasional, khususnya mereka yang pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Asadiyah Sengkang (wajokab.go.id, 2023). Selain itu, memang di antara 16 partai politik, PAN merupakan salah satu partai politik yang juga berbau religi, sehingga erat kaitannya dengan keterlibatannya yang bisa dibilang cukup sering berkolaborasi Bersama pesantren tertua tersebut, yakni Pesantren As'adiyah. Keberadaan H. Amran sebagai Bupati yang berasal dari partai PAN inilah yang terkenal akan upayanya berkegiatan politik dengan melibatkan basis keagamaan yang salah satunya dengan melibatkan pesantren terbesar yaitu Pesantren As'adiyah.

Namun demikian, belum banyak kajian yang secara spesifik mengkaji bagaimana relasi antara pesantren dan aktor politik lokal—khususnya di Kabupaten Wajo—dibentuk, dikelola, dan dijalankan dalam konteks kontestasi elektoral maupun pembangunan daerah. Meskipun pesantren As'adiyah memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Wajo, masih terdapat kekosongan penelitian yang menggali secara mendalam bagaimana kedekatan ini diterjemahkan ke dalam strategi politik, distribusi sumber daya, dan pembentukan opini publik. Apakah relasi ini bersifat timbal balik, pragmatis, atau justru melahirkan bentuk patronase politik baru yang membalut diri dalam simbol-simbol keagamaan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab dalam rangka memahami lebih jauh dinamika politik lokal berbasis keagamaan di daerah yang kental dengan identitas santri. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis hubungan strategis antara pesantren dan partai politik di Kabupaten Wajo, serta dampaknya terhadap konfigurasi kekuasaan dan pembangunan lokal

Kajian Literatur

Partai Politik dan Strategi Keagamaan

Dalam konteks politik Indonesia yang plural dan religius, partai-partai politik Islam memiliki orientasi ideologis yang khas, meskipun tidak homogen. Sejak masa Orde Baru hingga era reformasi, partai-partai seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) menunjukkan varian ideologis keislaman yang berbeda. PPP menampilkan pendekatan tradisional berbasis ormas Islam besar seperti NU, sementara PKS lebih mengadopsi gaya tarbiyah dengan pengaruh Ikhwanul Muslimin, sedangkan PAN sejak awal menunjukkan identitas Islam moderat yang berakar pada Muhammadiyah, dengan basis nilai keagamaan modern dan nasionalis. Menurut Ridlo (2013), perbedaan ideologis ini menentukan strategi politik dan basis konstituen masing-masing partai, namun semuanya menyadari pentingnya simbol dan nilai keagamaan sebagai instrumen mobilisasi politik dalam masyarakat Muslim Indonesia yang luas dan heterogeny (Zamakhshari, 2011).

Strategi komunikasi politik yang diadopsi oleh partai-partai Islam di Indonesia banyak bertumpu pada narasi religius dan nilai keagamaan (Mei, 2018). Strategi ini dijalankan bukan hanya untuk mempertahankan basis pemilih konservatif, tetapi juga sebagai alat branding yang kuat dalam menghadapi dinamika politik elektoral. Dalam penelitian Romli (2004), disimpulkan bahwa kampanye dengan narasi agama cenderung berhasil menarik simpati di daerah yang secara historis memiliki basis Islam kuat. Komunikasi politik berbasis nilai keagamaan tidak hanya dilakukan melalui media massa dan digital, tetapi juga melalui pendekatan tatap muka di ruang-ruang keagamaan seperti masjid, pesantren, majelis taklim, dan forum dakwah lainnya (Nugroho, 2017). Di sinilah pesantren menjadi sangat strategis, di mana Partai Politik secara aktif menggunakan forum keagamaan seperti kajian, khutbah Jumat, dan kegiatan dakwah sebagai sarana menyampaikan pesan politik yang dikemas secara normatif-religius (Qomar, 2005).

Branding politik yang efektif dalam partai-partai Islam di Indonesia sering kali bergantung pada figur keagamaan. Kyai, ustaz, dan alumni pesantren berperan ganda sebagai simbol religius sekaligus agen politik (Yasmadi, 2005). Figur-figur ini

memiliki kredibilitas sosial dan spiritual yang tinggi, terutama di komunitas-komunitas Muslim tradisional. Lukens-Bull (2001) menyebut bahwa pesantren berfungsi sebagai "reservoir" otoritas moral yang sangat berpengaruh terhadap keputusan politik komunitasnya. Keberadaan kader-kader yang merupakan alumni Pondok Pesantren memperkuat citra keagamaan partai dan menambah legitimasi di mata pemilih lokal. Fenomena ini mencerminkan bagaimana strategi simbolik dan afiliasi keagamaan dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk opini publik dan perilaku elektoral.

Dengan demikian, orientasi ideologis partai-partai Islam di Indonesia, strategi komunikasi politik mereka yang berbasis nilai-nilai keagamaan, serta branding melalui figur keagamaan merupakan tiga elemen kunci yang saling terhubung dalam konteks politik elektoral di Indonesia (Romli 2004, Ridlo, 2013). Praktik-praktik tersebut semakin relevan di daerah seperti Wajo yang dikenal sebagai kota santri, di mana ikatan antara agama dan politik begitu erat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa politik identitas berbasis keagamaan bukan hanya wacana nasional, tetapi juga menjadi praktik konkret yang mewarnai kontestasi politik lokal di berbagai daerah di Indonesia.

Pesantren sebagai Institusi Sosial dan Politik

Pesantren di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai institusi sosial dan keagamaan yang mengakar kuat dalam Masyarakat (Yusnedi, 2019). Sejak awal abad ke-20, pesantren telah memainkan peran sentral dalam menyebarkan ajaran Islam dan membentuk karakter masyarakat Muslim, terutama di pedesaan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Dhofier (2011), pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat otoritas moral dan sosial. Haikal (2024) mempertegas bahwa transformasi pesantren dari lembaga pendidikan menjadi aktor sosial yang lebih luas adalah respons terhadap dinamika sosial-politik di Indonesia, termasuk dalam konstelasi kekuasaan dan demokrasi. Hal ini terlihat jelas pada konteks lokal seperti Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai kota santri, di mana pesantren menjadi jantung kehidupan sosial dan spiritual Masyarakat (Harbani, 2024).

Lebih jauh, pesantren berkembang sebagai basis moral, sosial, bahkan politik. Lukens-Bull (2001) mencatat bahwa pesantren secara historis memegang peran sebagai penjaga moralitas umat dan turut serta dalam pembentukan identitas politik Islam. Fungsi ini bertransformasi ketika pesantren, dalam kapasitas informalnya, mulai menjadi arena perebutan pengaruh oleh aktor-aktor politik. Studi pada Pondok Pesantren menunjukkan bahwa pesantren tidak sekadar menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga memainkan peran simbolik dan praktis dalam kontestasi politik lokal (Aqifah, 2020). Relasi yang terjalin antara pesantren dan Partai politik merupakan bukti nyata pergeseran fungsi ini. Banyak kader partai politik merupakan alumni pesantren dan keberadaan mereka memperkuat legitimasi religius partai tersebut di mata masyarakat. Partai politik berbasis Islam memanfaatkan simbol keagamaan dan kegiatan dakwah sebagai strategi politik yang efektif untuk menjangkau pemilih, memperkuat citra partai sebagai bagian dari komunitas pesantren (Cipta, 2023).

Transformasi ini menunjukkan bagaimana pesantren tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga menjadi aktor politik lokal yang strategis. Perubahan ini bersifat gradual dan dipengaruhi oleh konteks sosial-politik daerah. Pesantren bersifat informal namun intens, ditandai dengan silaturahmi, pemberian bantuan infrastruktur, hingga pelibatan dalam kegiatan dakwah politik. Ini mengafirmasi temuan Ramdani (2009) yang menunjukkan bahwa pesantren dapat menjadi “broker” dalam kontestasi elektoral, khususnya di daerah dengan basis keagamaan yang kuat. Meskipun para pengurus pesantren secara formal menolak afiliasi politik, realitas di lapangan menunjukkan adanya hubungan simbiosis antara pesantren dan partai politik dalam rangka pertukaran legitimasi dan dukungan elektoral.

Dalam konteks Kabupaten Wajo, PAN memanfaatkan identitas religius pesantren untuk memperkuat posisinya dalam pemilihan kepala daerah. Keberhasilan Bupati Amran Mahmud, yang memiliki afiliasi dengan PAN dan latar belakang Muhammadiyah, juga tidak terlepas dari dukungan jaringan alumni pesantren. Kemenangan politik ini, seperti dijelaskan dalam hasil penelitian, merupakan buah dari strategi komunikasi politik yang dikemas dalam narasi

keagamaan dan silaturahmi. Ini menunjukkan bagaimana pesantren telah bergeser menjadi aktor strategis dalam dinamika politik lokal, sebuah fenomena yang sebelumnya telah diamati oleh Nugroho (2017) dalam studi serupa di wilayah lain.

Dengan demikian, pesantren kini dapat dipahami sebagai institusi multidimensi yang memainkan peran di tiga ranah sekaligus: moral, sosial, dan politik. Relasi ini tidak bersifat struktural, melainkan lebih banyak berlangsung melalui jejaring sosial dan simbolik yang melibatkan alumni, tokoh agama, dan elite partai (Romli 2004, Ramdani, 204). Fenomena ini membuka ruang untuk kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pesantren sebagai institusi tradisional dapat tetap relevan dalam lanskap politik modern, tanpa kehilangan otoritas moral yang menjadi fondasinya. Dalam hal ini, pesantren tidak hanya menjadi objek politisasi, tetapi juga subjek yang aktif menentukan arah politik lokal, sebagaimana ditunjukkan dalam studi-studi mutakhir dan temuan lapangan di Wajo.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika relasi antara partai politik dan pesantren dalam konteks lokal Kabupaten Wajo. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik fenomena yang diteliti, yaitu interaksi sosial dan strategi politik berbasis nilai keagamaan yang tidak dapat dijelaskan melalui angka-angka statistik semata. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna di balik tindakan sosial dan komunikasi politik yang dilakukan oleh para aktor, baik dari kalangan pesantren maupun partai politik. Penelitian ini bersifat deskriptif karena fokusnya adalah pada pemaparan secara sistematis mengenai pola-pola relasi yang terjadi, bukan pada pengujian hipotesis.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yakni berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih meliputi pengurus dan tokoh pesantren As'adiyah, kader Partai Amanat Nasional (PAN), alumni pesantren yang aktif di bidang politik, serta tokoh masyarakat yang memahami konfigurasi sosial-keagamaan di Wajo. Informan tersebut dianggap memiliki pengetahuan langsung mengenai hubungan simbolik, moral, maupun

struktural antara lembaga pesantren dan aktor politik lokal. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan format semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi isu-isu penting tanpa kehilangan fokus pada topik utama.

Selain itu, data sekunder turut digunakan sebagai pelengkap, seperti dokumen resmi pesantren, arsip kegiatan politik, pemberitaan media daring, dan catatan publik pemerintah daerah yang berkaitan dengan aktivitas bantuan keagamaan atau komunikasi politik. Semua data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles et al. (2014) yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk naratif yang memudahkan interpretasi temuan, dan akhirnya ditarik kesimpulan dengan tetap mempertimbangkan konteks lokal dan keterkaitan antar data.

Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki posisi berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan temuan hasil wawancara dengan data dokumentasi dan pengamatan lapangan. Validitas juga diperkuat melalui konfirmasi ulang terhadap narasi atau klaim-klaim tertentu dengan menghadirkan informasi tambahan dari aktor lain yang terlibat atau mengetahui konteks yang sama. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan kredibel mengenai bagaimana pesantren dan partai politik menjalin hubungan strategis dalam lanskap politik lokal di Wajo yang sarat akan simbol dan nilai keagamaan.

Hasil Penelitian

Kaitan Pesantren dengan Partai Politik

Pondok Pesantren As'adiyah bisa dibilang cenderung memiliki kaitan yang erat dengan kader Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Wajo, terutama karena

Kabupaten Wajo dikenal sebagai Kota Santri dengan adanya pondok pesantren yang besar dan berpengaruh seperti Pondok Pesantren As'adiyah. Pondok Pesantren As'adiyah merupakan lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang besar dan memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat, khususnya di Kabupaten Wajo. Kader PAN yang berasal dari daerah ini mungkin memiliki keterkaitan dengan pondok pesantren tersebut secara personal atau melalui relasi sosial dan politik.

Dalam konteks politik lokal, dukungan dari pondok pesantren dan komunitas santri dapat menjadi faktor penting bagi kader PAN dalam memperoleh dukungan elektoral. Keterlibatan kader PAN dalam kegiatan dan program yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan santri juga dapat meningkatkan popularitas dan citra partai di mata masyarakat.

Pondok Pesantren As'adiyah, sebagai pusat pendidikan Islam, juga dapat menjadi tempat di mana kader PAN dan pemimpin partai lainnya belajar dan mendalami pemahaman agama serta nilai-nilai politik Islam. Kader-kader PAN yang berasal dari lingkungan pondok pesantren ini mungkin memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks politik. keterkaitan antara Pondok Pesantren As'adiyah dengan kader Partai Amanat Nasional di Kabupaten Wajo dapat terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari pengaruh keagamaan, jaringan sosial, dukungan politik, hingga pendidikan politik yang diberikan di lingkungan pondok pesantren tersebut.

Pemerintah Kabupaten Wajo menjadi salah satu mitra penting dimana posisi PAN yang mampu menggeser incumbent diuntungkan oleh kader parpolnya yang banyak merupakan Alumni Ponpes As'adiyah, dan juga sangat diuntungkan dengan program keagamaan yang dibuatnya sehingga masyarakat cenderung satu passion dan tergerak hatinya secara psikis karena menganggap PAN dan aktor yang diusung seolah satu pemahaman dengan kondisi masyarakat dan Wajo saat ini. Jadi bisa dibilang PAN dan Ponpes hanya berupaya menjaga hubungan secara moral yang baik. Bahkan dipertegas dengan ungkapan informan A bahwa:

“kami memang PAN acapkali melakukan kegiatan dan program keagamaan di depan santri, baik itu acara agama, khutbah jumat, dan kajian atau diskusi di pesantren, seperti di ponpes Asadiyah”.

Secara historis memang bahwa antara PAN dan As'adiyah dapat berkorelasi dengan alasan historis, lingkungan sosial, dan *status quo* lapangan. Hal ini didukung oleh sebaran alumni Ponpes As'adiyah yang luas, dan kader partai politik yang banyak merupakan alumni dari ponpes Asadiyah sehingga memang sangatlah menguntungkan partai politik tertentu. Terkhusus PAN yang didominasi oleh alumni santri Ponpes As'adiyah, sehingga memang keberhasilan alumni santri, dan posisi aktor dengan wadah PAN yang berlabel agama sangat menguntungkan dan merupakan extraordinary strategy yang tidak disengaja.

Sebagaimana ungkapan Informan AH yang juga salah seorang pengurus Pondok Pesantren As'adiyah yang mengatakan:

“Ponpes Asadiyah itu merupakan lembaga Pendidikan dan dakwah, sehingga secara langsung hubungan dengan partai itu tidak ada, tidak ada afiliasi secara formal itu tidak ada. Namun, dalam bentuk kerja sama dalam hal lain tetap ada. Secara politik, memang tidak ada kerja sama dan kontrak politik. Boleh jadi secara personal, Partai memang butuh Ponpes ini sebagai Kota Santri, apalagi As'adiyah ini pesantren terbesar di wajo dan banyak pengikut maupun peminatnya. Memang biasa ada dana Aspirasi dan bantuan Partai, namun itu bisa ditafsirkan sendiri. Bahkan contoh, misal ada dana dari PUPR, atau lembaga lain yang memberikan bantuan kepada pesantren ini mengatakan bahwa dana ini merupakan bantuan dan dana titipan dari Partai dan dieksekusi oleh lembaga sebagai pihak ketiga, tapi intinya mereka tetap melibatkan pesantren. Bantuannya biasa berupa kendaraan, dana, pembangunan, dll Sehingga, Secara hubungan langsung itu tidak ada, kecuali secara moral, pribadi, dan aktor tertentu yang bersilaturahmi antara pesantren dan fraksi.”

Yang jika dilihat dan dianalisis berdasarkan ungkapan di atas bahwa secara tidak langsung memang ada hubungan dan relasi politik yang terjadi melalui aktor, personal, dan kader partai dengan dalih diksi “silaturahmi”. Bahkan dikatakan acapkali ada dana aspirasi dari partai secara langsung, ataupun melalui pihak ketiga, berupa bantuan, mobil, pembangunan, dll. Secara tidak langsung hal itu merupakan bagian dari relasi dan strategi politik partai untuk mendapatkan syara masyarakat yang tergabung dalam Ponpes yang besar ini.

Hubungan antara Kemenangan Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2019 dengan Kondisi Sosial Masyarakat Wajo sebagai Kota Santri

Kemenangan Bupati Amran Mahmud pada Pemilihan Kepala Daerah 2019 tidak lepas dengan relasi partai pengusungnya dengan Pondok Pesantren khususnya As’adiyah. Hal ini dikarenakan beliau merupakan bagian dari Muhammadiyah dan kader PAN. Meskipun sebagian besar alumni Ponpes As’adiyah merupakan bagian dari Nahdatul ulama. Hal ini dipertegas oleh informan SDR yang juga kader PAN bahwa:

“Namun, perlu diketahui bahwa Upaya Ekstrem PAN dalam menggeser Golkar dan Incumbent iyalah berpacu pada program kerja dan program politik PAN yang merujuk pada menjual program, sehingga program utama sehingga menjadikan PAN mengusung bupati tahun kemarin, dan tahun ini juga Kembali mengusung pasangan yang sama.”

Amran Mahmud berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Wajo 2019-2024 melalui strategi perencanaan komunikasi politik yang matang. Dia memanfaatkan beberapa pendekatan yang terbukti efektif.

Pertama, dalam strategi perencanaan komunikasi politiknya, Amran Mahmud fokus pada elemen-elemen kunci seperti positioning, branding, segmenting, dukungan, dan anggaran. Dia memaksimalkan kapasitas personalnya dengan merujuk pada aktivitas yang dimilikinya sebagai seorang akademisi, politisi, organisator, dan tokoh keagamaan. Branding dirinya sebagai figur yang sederhana, santun, muda, pendakwah dan merakyat juga membantu menciptakan citra yang

kuat di mata pemilih. Hal ini sangat sejalan dengan Posisi PAN yang bergerak di keagamaan dengan kata kunci “branding pendakwah, dan komunikasi berdalih silaturahmi” sangat menguntungkan beliau.

Kedua, dalam tindakan komunikasi politiknya, Amran Mahmud secara aktif melakukan pertemuan tatap muka dengan pemilih potensial, membentuk relawan, serta menjalin hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Dia juga memanfaatkan berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun online, untuk menjangkau lebih banyak massa. Mobilisasi massa ke acara kampanye terbuka juga menjadi bagian penting dari strategi komunikasinya. Keunggulan strateginya termasuk personal branding yang kuat, komunikasi tatap muka yang intensif, dan animo masyarakat yang tinggi terhadap perubahan birokrasi yang diusungnya. Sehingga sederhannaya beliau berhasil merebut kursi incumbent karena highlight pada komunikasi dan silaturahmi yang kuat melalui program keagamaan karena menyesuaikan dengan kondisi geografis dan keadaan status quo kabupaten Wajo sebagai Kota Santri.

Diskusi

Analisis Relasi Simbolik dan Praktis antara Ponpes As'adiyah dan PAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren As'adiyah memiliki keterkaitan yang erat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Wajo. Keterikatan ini bukan berupa afiliasi struktural atau formal, melainkan berupa hubungan simbolik, kultural, dan personal yang berjalan secara informal namun intensif. Hal ini sejalan dengan pola hubungan antara pesantren dan partai politik di banyak wilayah lain di Indonesia sebagaimana dibahas dalam kajian literatur (Lukens-Bull, 2001; Nugroho, 2017).

Secara praktis, kedekatan ini tercermin melalui berbagai kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh PAN di lingkungan pesantren. PAN aktif melakukan kegiatan dakwah, khutbah Jumat, pengajian, serta silaturahmi dengan pengurus dan santri Pondok Pesantren As'adiyah. Ini merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang berbasis nilai keagamaan, sebagaimana dijelaskan oleh Romli (2004)

dan Mei (2018), di mana partai politik memanfaatkan forum keagamaan sebagai media efektif untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.

Dukungan yang diberikan PAN kepada pesantren juga bersifat material, seperti bantuan dana aspirasi, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan kendaraan operasional. Bantuan tersebut seringkali disampaikan melalui diksi "titipan dari partai", meskipun secara formal tidak ada kontrak politik. Fenomena ini mengafirmasi temuan Ramdani (2009) tentang peran pesantren sebagai "broker politik" yang meskipun secara formal netral, namun secara faktual menjadi titik temu bagi distribusi sumber daya politik.

Dari perspektif sosiologis-politik, pesantren berfungsi sebagai institusi sosial yang memiliki otoritas moral di mata masyarakat Wajo. Keberadaan alumni Pondok Pesantren As'adiyah yang banyak berkiprah di PAN memperkuat legitimasi PAN sebagai partai yang religius, sesuai dengan citra PAN yang sejak awal mengusung Islam moderat berbasis Muhammadiyah (Ridlo, 2013). Namun unikny, di Wajo, alumni As'adiyah yang secara tradisi lebih dekat dengan Nahdlatul Ulama justru banyak berafiliasi dengan PAN yang dihapuskan dari Muhammadiyah, menunjukkan adanya pragmatisme politik yang melampaui sekat-sekat ormas Islam.

Hal ini menunjukkan proses adaptasi politik yang relevan dengan konteks lokal. Seperti dikemukakan oleh Yasmadi (2005), figur-figur keagamaan seperti kyai dan alumni pesantren seringkali memainkan peran ganda sebagai agen moral sekaligus agen politik. Di Wajo, peran ini semakin kuat karena pesantren As'adiyah merupakan pesantren tertua dan terbesar yang memiliki pengaruh sosial luas. Dalam konteks ini, alumni pesantren menjadi jembatan antara kepentingan politik dan otoritas moral masyarakat.

Relasi antara pesantren dan PAN di Wajo juga mencerminkan strategi politik berbasis "branding aktor pendakwah" dan komunikasi "silaturahmi politik" sebagaimana dikemukakan oleh Qomar (2005). Di sini, politik tidak dipraktikkan secara transaksional vulgar, melainkan dikemas dalam bingkai simbolik berdasarkan nilai keagamaan. PAN membangun citra sebagai partai yang sejalan

dengan aspirasi keagamaan masyarakat Wajo, sehingga hubungan politik dengan pesantren berjalan melalui komunikasi yang normatif dan berbasis nilai.

Dari temuan lapangan, hubungan antara Pondok Pesantren As'adiyah dengan PAN lebih menyerupai hubungan patron-klien berbasis moralitas. Para aktor politik dari PAN menjalin hubungan personal dengan tokoh pesantren, memberikan bantuan materi, dan membangun komunikasi yang intens melalui kegiatan keagamaan. Dalam kajian politik lokal, praktik semacam ini dapat dianggap sebagai strategi berkonsultasi moral (koalisi moral), di mana legitimasi keagamaan digunakan untuk membangun kekuatan politik elektoral (Haikal, 2024; Aqifah, 2020).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan pesantren dengan partai politik, khususnya antara As'adiyah dan PAN, bukanlah hubungan yang sepenuhnya bebas dari kepentingan pragmatis. Di satu sisi, pesantren tetap menjaga citra netralitasnya secara formal, namun di sisi lain, terjadi proses pertukaran sumber daya sosial dan politik yang saling menguntungkan. Pesantren mendapat dukungan materi dan penguatan jaringan sosial, sementara PAN mendapat legitimasi keagamaan dan basis pemilih yang loyal.

Dengan demikian, konteks Wajo sebagai kota santri menciptakan ekosistem politik yang khas, di mana pesantren menjadi aktor strategis dalam politik lokal. Relasi ini bukan sekadar hubungan antara lembaga pendidikan dan partai politik, melainkan bagian dari strategi integrasi sosial-politik yang berjalan secara simultan antara dakwah, pendidikan, dan kontestasi pemilu.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Pondok Pesantren As'adiyah dengan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Wajo berlangsung secara informal namun intens. Hubungan ini tidak diwujudkan dalam bentuk afiliasi formal atau kontrak politik, melainkan melalui jaringan sosial alumni, kegiatan keagamaan, dan pemberian yang dikemas dalam silaturahmi politik. Kader-kader PAN yang berasal dari alumni Ponpes As'adiyah menjadi aktor kunci dalam menjembatani kepentingan politik dan dasar keagamaan.

Relasi ini menguntungkan PAN secara elektoral karena berhasil memanfaatkan citra keagamaan untuk memperkuat legitimasi politik, terutama di daerah yang secara kultural dikenal sebagai kota santri. Di sisi lain, pesantren memperoleh dukungan berupa bantuan materi dan penguatan jejaring sosial, meskipun secara normatif tetap menjaga posisi sebagai lembaga keagamaan yang netral.

Keberhasilan PAN dalam memenangkan kontestasi politik di Wajo tidak lepas dari strategi komunikasi politik yang menggunakan pendekatan simbolik berbasis agama, memanfaatkan tokoh alumni pesantren sebagai representasi moral dan politik sekaligus. Ini sesuai dengan pola politik identitas yang semakin menguat dalam konteks lokal maupun nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengayaan teori politik lokal dan hubungan agama-politik, khususnya dalam kerangka teori patronase politik dan simbolik. Temuan ini membuktikan bahwa hubungan antara partai politik dan institusi keagamaan di tingkat lokal sering kali tidak berlangsung secara formal, tetapi melalui jejaring sosial dan simbolik yang bersifat patron-klien berbasis moralitas (Lukens-Bull, 2001; Ramdani, 2009).

Penelitian ini mengidentifikasi setidaknya tiga implikasi teoritik. Pertama, memperluas pemahaman teori politik identitas. Penelitian ini menegaskan bahwa politik identitas tidak hanya terjadi dalam skala nasional melalui simbolisasi agama, tetapi juga berjalan di tingkat lokal melalui hubungan pesantren dan partai politik yang memanfaatkan identitas keagamaan untuk membentuk loyalitas elektoral. Kedua, model pengayaan komunikasi politik berbasis nilai. Studi ini memperkuat argumen Romli (2004) dan Nugroho (2017) bahwa komunikasi politik berbasis nilai keagamaan efektif diterapkan dalam masyarakat dengan struktur sosial tradisional, seperti komunitas santri di Wajo. Implikasi ketiga adalah penguatan konsep pesantren sebagai aktor sosial-politik. Penelitian ini mendukung gagasan Haikal (2024) dan Dhofier (2011) bahwa pesantren kini bertransformasi dari lembaga pendidikan keagamaan menjadi lembaga sosial-politik yang berperan aktif dalam proses demokrasi lokal, baik sebagai objek maupun subjek politik.

Oleh karena itu, untuk memperkaya kajian patronase politik dan simbolik dalam perspektif peran pesantren di dinamika politik Indonesia, penulis menyarankan untuk melakukan studi komparatif dengan pesantren lain di wilayah

berbeda untuk menguji apakah pola hubungan yang sama juga terjadi di luar Wajo atau luar Sulawesi-Selatan. Perlu penelitian lanjutan terkait dampak jangka panjang hubungan ini terhadap independensi lembaga pesantren dan kualitas demokrasi lokal. Penelitian lebih lanjut juga dapat menggali bagaimana pola ini mempengaruhi kaderisasi politik di lingkungan pesantren.

Daftar Pustaka

- Adam, R. (2020). *Political marketing: Strategi membangun konstituen dengan pendekatan*. Surakarta: Sebelas Maret Press.
- Alimin. (2013, September 19). *Sejarah As'adiyah*.
<https://asadiyahpusat.org/2013/09/19/sejarah-asadiyah/>
- Ardiansyah. (2014). *Strategi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Maros* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Arief, S. (2007). *Aktor pembentuk jaringan pesantren di Sulawesi Selatan 1928–1952*. *Jurnal Lentera Pendidikan*, 10(2).
- As'ad, M. (2018). *Pondok Pesantren As'adiyah*. *Al-Qalam: Jurnal Pesantren As'adiyah*, 15(2).
- Assadiyah Pusat. (2022). *Biografi*. <https://asadiyahpusat.org/biografi/>
- Aqifah, N. (2020). *Pesantren Dan Politik: Peran Dan Pengaruh Dalam Pilpres 2019 Di Kota Makassar* (Skripsi). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo. (2021). *Kabupaten Wajo dalam angka 2021*. Sengkang: BPS.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cipta, H. (2023). *Politik dan Kaum Santri*. Medan: UMSU Press.
- Fernando, H., Larasati, Y. G., Abdullah, I., Jubba, H., Mugni, A., & Persadha, P. D. (2023). *The de-existence of Islamic political parties in general elections: A case*

- study of Indonesia as a Muslim-majority country. *Cogent Social Sciences*, 9(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2225838>
- Goodin, R. E. (1996). Institutions and their design. In R. E. Goodin (Ed.), *The theory of institutional design* (pp. 1-53). Cambridge: Cambridge University Press.
- Haikal, M. H. (2024). Peran Politik Islam Dalam Dinamika Pemerintahan Perspektif Dalam Negeri dan Luar Negeri. *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 137-151. <https://doi.org/10.32332/yqjcf265>
- Harbani, R. (2024, April 19). Pondok Pesantren Asadiyah terbesar di Indonesia Timur. Detik.com. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6444194/profil-pondok-pesantren-asadiyah-ponpes-tertua-terbesar-di-indonesia-timur>
- Hudajat, I. (2009). *Teori-teori politik*. Malang: Setara Press.
- Humas Asadiyah. (2024, April 19). Ponpes Asadiyah Kabupaten Wajo. <https://asadiyahpusat.org/tentang-kami/>
- Humas Mas Asadiyah. (2024, April 19). Pendidikan MAS Nurul Asadiyah Wajo. <https://www.nurulasadiyah.sch.id/about-us/>
- Husnul Rijal, F. (2019). Relasi partai politik dengan pesantren (Studi kasus Partai Kebangkitan Bangsa dengan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar) (Skripsi, Universitas Siliwangi).
- Kaharuddin. (2015). Pesantren As'adiyah Sengkang pada masa kepemimpinan K.H. Muhammad Yunus Martan (1961-1968). *Jurnal*, 1(1).
<http://eprints.unm.ac.id/12807/>
- Kartono, K. (1996). *Pendidikan politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Kholik, A. (2019). *Jurnal komunikasi dan media*. *Jurnal Komunikasi dan Medin*, 4(1).
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik praktis riset komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2025). Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan 16 Rusun Untuk Dukung Pengembangan SDM di Jawa Tengah. Retrieved July 2, 2025, from Kementerian PUPR website:
<https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-selesaikan-pembangunan-16-rusun-untuk-dukung-pengembangan-sdm-di-jawa-tengah>

- Lukens-Bull, R. A. (2001). Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia. *Anthropology Education Quarterly*, 32(3), 350–372. <https://doi.org/10.1525/aeq.2001.32.3.350>
- Nugroho, A. (2017). Pergulatan Politik Pesantren Era Reformasi (Studi Interaksi Pesantren Dengan Partai Politik Di Kab. Banyumas). *Jurnal Review Politik*, 7(1), 74–96.
- Nurdin, N., Hasmulyadi, H., & Hamzah, E. (2024). The Role of the As'adiyah Pesantren in Countering Radicalism in Wajo of Indonesia. *FIKRAH*, 12(2), 215–215. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v12i2.26522>
- Nurjaman, A., Yusuf, M., & Witro, D. (2021). Islamic Boarding School People In Politics (Case Study of Miftahul Huda Islamic Boarding School Manonjaya Tasikmalaya).
- Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan, 15(2), 160–169.
<https://doi.org/10.52048/inovasi.v15i2.240>
- Mastuhu. (1994). *Dinamika model pendidikan pesantren*. Jakarta: INIS.
- Mei, W. (2018). Relasi kuasa antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ogan Ilir Sumatera Selatan (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mujamil Qomar. (2005). *Pesantren: Dari transformasi metodologi menuju demokratisasi institusi*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, A. (2017). Pergulatan politik pesantren era reformasi: Studi interaksi pesantren dengan partai politik di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Review Politik*, 7(1).
- PAN (Partai Amanat Nasional). (2023). Tentang PAN. <https://pan.or.id/tentang-pan/>
- Ramdani, A. (2009). Relasi Partai Politik dengan Pondok Pesantren: Studi Kasus PPP dengan Pondok Pesantren Darttafsir Bogo (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Romli, L. (2004). Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1), 29–48.

- Syamsuddin, A. (2007). Aktor Pembentuk Jaringan Pesantren di Sulawesi Selatan 1928-1952. *Lentera Pendidikan*, 10(2), 185–195.
<https://doi.org/10.24252/lp.2007v10n2a5>
- Ridlo, A. H. (2013). *Partai politik Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli, L. (2004). Partai Islam dan pemilih Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sitepu, B. (2005). *Pengembangan sumber belajar*. Depok: PT Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wajokab. (2022, Oktober 26). Pembangunan rusun Kampus III: Bupati Wajo harap Ponpes Asadiyah Sengkang makin berkembang.
<https://wajokab.go.id/berita/detail/pembangunan-rusun-kampus-iii-bupati-wajo-harap-ponpes-asadiyah-sengkang-makin-berkembang>
- Zamakhsyari, D. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Yasmadi. (2005). *Modernisasi pesantren: Kritik Nurcholis Madjid terhadap pendidikan Islam tradisional*. Jakarta: Ciputat Press.
- Yusnedi, A. (2019). *Sosiologi politik*. Jakarta: Rajawali